

PEMBARUAN DAN PERAN SOSIAL TRANSFORMATIF PESANTREN DAN ISLAM INDONESIA

Achmad Maulani

Pusat Studi Asia Pasifik UGM

Alamat email: maulani@yahoo.com

Abstract

Discuss about Islam in Indonesia is inseparate from the discourse about pesantren and Nahdatul Ulama. Both entities are an Islamic group that has contributed significantly for the dynamics of Indonesian Islam . Pesantren and Nahdatul Ulama have dialogued with social culture of society through the local wisdom in pesantren. Pesantren is the real face of Islam in Indonesia. This paper want to discuss about the dynamics and socially transformative role of pesantren in Indonesia

Keywords: pesantren, Islam Indonesia, peran sosial transformatif

Intisari

Diskusi tentang Islam di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari isu seputar pesantren dan Nahdlatul Ulama. Kedua unsur ini merupakan entitas kelompok Islam yang secara signifikan berkontribusi pada dinamika perkembangan Islam di Indoneisa. Pesantren dan Nahdlatul Ulama berkontribusi pada pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat, khususnya melalui pelestarian budaya lokal di pesantren. Karenanya tidaklah mengherankan kalau sebagian orang berpandangan bahwa pesantren merupakan wajah nyata Islam di Indonesia. Artikel ini hendak mengkaji peran transformative pesantren baik secara sosial maupun budaya.

Kata Kunci: Pesantren, Islam Indonesia, Peran Sosial dan Transformasi Sosial

Pendahuluan

Satu hal yang harus diakui adalah bahwa ketika bicara tentang Islam Indonesia, maka yang tidak bisa diabaikan adalah diskursus tentang pesantren dan Nahdlatul Ulama. Kedua unsur ini perlu dibincang dalam kaitannya dengan Islam Indonesia karena baik pesantren maupun NU merupakan kelompok Islam yang memiliki dinamika dan viabilitas cukup tinggi dalam merajut Islam Indonesia. Dua entitas tersebut dalam perjalanan sejarahnya mampu membuktikan kemampuannya dalam mendialogkan Islam dengan sosial budaya masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren telah berkiprah besar dalam pengembangan ilmu keislaman tradisional dengan bingkai Aswaja yang disandingkan dengan kearifan lokal. Meminjam bahasa Abdurrahman Wahid¹ model keberagaman seperti yang dikembangkan pesantren inilah sesungguhnya yang merupakan wajah Islam Indonesia.

Dalam bingkai seperti itu, nilai-nilai Islam yang dianut dan kemudian disebarkan oleh pesantren akhirnya menjadi bagian intrinsik dari budaya masyarakat Islam Indonesia dengan karakteristiknya yang pluralis serta berwatak kebangsaan. Konsep pribumisasi Islam yang dikemukakan Abdurrahman Wahid untuk menjelaskan kekhasan Islam Indonesia seperti nilai-nilai yang dimiliki pesantren adalah sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana Islam sebagai ajaran yang normatif berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Konsep ini mencoba untuk menghindarkan tercabutnya sebuah nilai ajaran dari akar budaya yang dimiliki sebuah masyarakat.

Pribumisasi adalah bukan upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan budaya-budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Karena itu, inti pribumisasi Islam adalah kebutuhan bukan untuk menghindarkan polarisasi antara agama dan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan². Pribumisasi Islam dengan demikian menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan, melainkan berwujud dalam pola nalar keagamaan yang tidak lagi mengambil bentuk yang outentik dari agama, serta berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini memisahkan antara agama dan budaya. Dengan demikian tidak ada

1 Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, (Jakarta, Desantara: 2001)

2 *Ibid*, hlm 45

lagi pertentangan agama dan budaya. Dalam praktiknya, konsep pribumisasi Islam ini dalam semua bentuknya dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi keanekaragaman interpretasi dalam praktek kehidupan beragama di setiap wilayah yang berbeda-beda.

Dalam konteks seperti di atas itulah, pesantren tampaknya bisa menjadi garda depan dalam mengembangkan nilai-nilai Islam dan pada saat bersamaan juga mampu mengembangkan toleransi dengan budaya Indonesia. Modal besar yang dimiliki pesantren inilah ketika mampu dikelola dengan tepat akan menjadi kekuatan besar sekaligus sebagai pusat peradaban muslim di Indonesia. Untuk mencapai cita-cita luhur tersebut, tentu harus ada pemaknaan kembali terhadap nilai dan tradisi yang dimilikinya sehingga pesantren mampu melakukan transformasi sosial.

Untuk menjadikan pesantren sebagai pusat peradaban bagi muslim Indonesia, ada beberapa pokok masalah yang akan dikaji secara mendalam. Antara lain, bagaimana pesantren melakukan pemaknaan kembali atas nilai-nilai dan tradisi yang selama ini dipegang, seperti *tawassut*, *tasamuh*, *ta'adul* serta *tawazun* sebagaimana terkandung dalam ajaran ahlussunah wal jama'ah (Aswaja). Kajian ini juga akan memotret peran pesantren dalam transformasi sosial sehingga pesantren benar-benar mampu meneguhkan dirinya sebagai agen perubahan pada satu sisi, tetapi pada sisi lain juga mampu memerankan dirinya sebagai penjaga tradisi. Dengan demikian otentisitas pesantren sebagai perwujudan wajah Islam Indonesia dapat menjadi *rahmatan lil'alamin* bagi berbagai kelompok, golongan serta keragaman budaya yang ada. Untuk itu semua, tulisan ini lebih jauh juga akan membahas pembaruan-pembaruan yang harus dilakukan pesantren dalam banyak aspek, baik dibidang pendidikan, sosial, maupun dibidang ekonomi. Pesantren telah punya modal besar untuk merajut semua itu. Meminjam istilah Putnam(2003) pesantren sesungguhnya telah memiliki modal sosial (*social capital*) yang memadai untuk menjadikan dirinya sebagai pusat peradaban muslim di Indonesia. Modal sosial yang dimiliki pesantren sebagaimana dimaksud Putnam adalah berupa kepercayaan (*trust*), norma (*norms*) dan jejaring (*networks*).

Keberadaan pesantren yang eksis hingga saat ini jelas karena adanya kepercayaan masyarakat sebagai tempat *tafaqquh fiddin* (belajar ilmu agama) serta tempat persemaian ahlak dan nilai-nilai luhur sebagaimana diajarkan Islam. Bahkan, dalam perkembangannya, pesantren tidak hanya sebagai tempat belajar ilmu-ilmu agama saja, tetapi saat ini pesantren mampu mengkombinasikan dengan

perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan sebagai sebuah tuntutan zaman. Kepercayaan yang begitu kuat itulah yang menjadikan pesantren tetap eksis hingga saat ini. Selain itu, adanya norma-norma (*norms*) yang dipegang kuat oleh pesantren, yang dalam beberapa hal mempunyai karakteristik yang berbeda dengan lembaga-lembaga lain, juga semakin meneguhkan pesantren sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan yang mampu bertahan ditengah gelombang perubahan. Pada wilayah lain, adanya jejaring (*network*) antar pesantren dan adanya mata rantai yang tersambung (transmisi keilmuan) antara ulama-ulama pemangku pesantren tampaknya semakin memperkuat pesantren sebagai sebuah lembaga yang sangat menjunjung tinggi tradisi keilmuan dan juga menyadari pentingnya penyebaran gagasan (ilmu). Modal sosial itulah tampaknya ketika mampu diasah dan dikembangkan dengan baik akan benar mampu mewujudkan pesantren sebagai pusat peradaban Islam, paling tidak di Indonesia.

Pesantren dalam Lintasan Sejarah; Sebuah Penghampiran Historis

Ketika kita merunut sejarah panjang perjalanan pesantren, satu hal yang menjadi kelebihan utama pesantren adalah karena ia memiliki akar transmisi sejarah yang jelas. Ada mata rantai keilmuan yang terhubung dengan baik. Di kalangan sejarawan, terdapat perselisihan pendapat tentang siapa sesungguhnya yang pertama kali mendirikan pesantren dengan segala tradisinya di Indonesia. Sebagian kalangan ada yang menyebut bahwa Syaikh Maulana Ibrahim, yang dikenal dengan Syaikh Magribi, dari Gujarat adalah pendiri pondok pesantren di Jawa. Ada juga yang mengatakan Sunan Ampel atau Raden Rahmat sebagai pendiri pesantren pertama di Surabaya. Bahkan ada juga yang menulis bahwa Sunan Gunung Jati (Syaikh Syarif Hidayatullah) di Cirebon sebagai pendiri pesantren pertama sewaktu mengasingkan diri bersama pengikutnya dalam *khatwat*, mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah³

Hanya saja, data-data historis tentang bentuk institusi, materi, metode maupun terkait sistem pendidikan pesantren secara umum yang dibangun Syaikh Magribi sulit ditemukan. Namun demikian, secara esensial dapat diyakinkan bahwa Syaikh Maulana Ibrahim ini memang telah mendirikan pesantren di Jawa sebelum para wali lainnya. Argumen ini tampaknya diperkuat dengan pendapat Al-

3 Yunus, 1985; Zuhri, 1983; Said dan Affan, 1987.

Attas⁴ yang mengatakan bahwa Maulana Malik Ibrahim yang oleh kebanyakan ahli sejarah dikenal sebagai penyebar pertama Islam di Jawa dan mengislamkan wilayah-wilayah pesisir utara Jawa. Karena itu, benang merah yang bisa ditarik adalah bahwa jika benar pesantren telah dirintis oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim sebagai penyebar Islam pertama di Jawa, maka bisa dipahami apabila para peneliti sejarah dengan cepat mengambil kesimpulan bahwa pesantren adalah sebuah lembaga dakwah dan juga model pendidikan yang sama tuanya dengan Islam Indonesia⁵.

Meski sebagai sebuah lembaga keberadaan pesantren sama tuanya dengan Islam Indonesia, tetapi ada beberapa teori yang memperdebatkan dan mempertanyakan tentang asal usul pesantren; apakah pesantren benar-benar merupakan bentuk asli Indonesia ataukah mengadopsi sistem di negara lain atau juga dari kepercayaan lain.

Dua Teori Asal Usul Pesantren

Secara kelembagaan, meskipun masih kontroversi, teori tentang asal-usul pesantren sesungguhnya dapat dipetakan menjadi dua. Pendapat pertama, pesantren merupakan kesinambungan dari lembaga pendidikan keagamaan pra-Islam, seperti perdikan, sama sekali bukan struktur lembaga baru yang diimpor. Pendapat kedua mengatakan bahwa pesantren diadopsi dari sistem pendidikan Islam di Timur Tengah. Hasil penelitian yang dilakuka oleh Departemen Agama dengan Incis (*Indonesian Institute for Civil Society*)⁶ menunjukkan bahwa sistem pendidikan pesantren memiliki persamaan baik dengan sistem pendidikan di Timur-Tengah maupun dengan lembaga pendidikan Hindu-Budha. Tradisi kedua sistem pendidikan ini berubah sifat khasnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran (konvergensi) yang muncul dalam pesantren.

Selain kontroversi teori pendekatan untuk menggali sejarah pesantren, kontroversi lainnya adalah kapan lembaga pesantren ini muncul. Ada yang berpendapat bahwa pesantren sudah ada pada masa awal penyebaran Islam di Jawa. Tetapi pendapat lain menyatakan, teori yang berpendapat bahwa pesantren telah ada pada masa awal

4 S.M.N Al-Attas 1969, *Preliminary Statement a General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago*, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka), hlm 12-13

5 Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama da Islam Indonesia*, (Jakarta, Gramedia:1994), hlm 84

6 Departemen Agama dengan Incis (*Indonesian Institute for Civil Society*), 2002

penyebaran Islam di Jawa itu merupakan ekstrapolasi dari pengamatan pada akhir abad ke-19 M. Pesantren menurut pendapat kedua ini, muncul pada akhir abad ke-18 M, dan mengalami perkembangan yang cepat pada abad ke-19 M.

Pararel dengan Lembaga Pendidikan pra-Islam

Menurut Manfred Ziemek⁷, pesantren merupakan hasil perkembangan secara pararel dari lembaga pendidikan pra-Islam yang telah melembaga berabad-abad lamanya. Bahkan menurut Nurcholish Madjid, pesantren mempunyai hubungan historis dengan lembaga-lembaga pra Islam. Lembaga yang serupa pesantren ini sebenarnya sudah ada sejak masa kekuasaan Hindu-Budha sehingga Islam tinggal meneruskan dan mengislamkan lembaga pendidikan yang sudah ada masa itu. Senada dengan pendapat di atas, Denys Lombard dalam karya monumentalnya, *Nusa Jawa* menyatakan bahwa pesantren mempunyai hubungan dengan lembaga keagamaan pra-Islam karena terdapat kesamaan di antara keduanya. Ada tiga argumentasi yang dikemukakan Lombard.

Pertama, tempat pesantren jauh dari keramaian, seperti halnya pertapaan bagi 'resi untuk menyepi', santri pesantren juga memerlukan ketenangan dan keheningan untuk menyepi dan bersemedi dengan tenteram. Pesantren seringkali dirintis oleh kiai yang menjauhi daerah-daerah hunian untuk menemukan tanah kosong yang masih bebas dan cocok untuk digarap. Seperti halnya rohaniawan abad ke-14 M, seorang kiai membuka hutan di perbatasan dunia yang sudah dihuni, mengislamkan para kafir daerah sekeliling, dan mengelola tempat yang baru dibabad. Kedua, ikatan antara guru dan murid sama dengan ikatan antara kiai dan santri, yaitu ikatan 'kebakakan' dari orang ke orang, yang sudah tampil sebagai ikatan pokok pada zaman kerajaan Hindu-Budha, bahkan sudah ada sebelumnya. Ketiga, antara pesantren dan lembaga keagamaan pra-Islam atau dharma seperti juga antar pesantren serta kebiasaan lama untuk berkelana, yakni untuk melakukan pencarian ruhani dari satu pusat ke pusat lainnya.

Adopsi Lembaga Pendidikan Timur-Tengah

Pendapat kedua menyatakan pesantren diadopsi dari lembaga pendidikan Islam Timur-Tengah. Menurut Martin van Bruinessen

⁷ Manfred Ziemek, *Pesantren dan Perubahan Sosial* (Jakarta, P3M:1983), hlm 65

⁸, pesantren bukan merupakan kesinambungan dari lembaga pendidikan keagamaan pra-Islam. Martin justru cenderung melihat bahwa ada kedekatan antara pesantren dengan sistem pendidikan Islam di Timur-Tengah. Sementara Zamakhsyari Dhofier⁹ menyatakan bahwa pesantren merupakan tradisi pendidikan Jawa Madura. Pendapat Dhofier ini didasarkan pada pendapat Brumund yang menulis pada tahun 1857 tentang pendidikan di Jawa dalam bahasa Belanda. Pendapat Brumund ini belakangan juga diikuti dan dikembangkan oleh sarjana peminat kajian Islam Indonesia seperti van de Berg, Snouck Hurgronje dan Clifford Geertz. Lebih jauh dalam kajiannya Dhofier juga menyatakan bahwa pesantren di Jawa (Indonesia) merupakan kombinasi antara madrasah sebagai pusat pendidikan dan kegiatan tarekat.

Dalam kajiannya, Bruinessen¹⁰ menangkap kesan bahwa pesantren dalam bentuk seperti yang ada sekarang belum ada di seluruh Jawa pada abad ke-19. Ia menyatakan bahwa ada lembaga-lembaga yang mirip pesantren di Priangan, Pekalongan, Rembang, Kedu (Magelang, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Purworejo, dan sekitarnya) Surabaya, Madiun, dan Ponorogo (terletak di Tegalsari). Di daerah-daerah inilah terdapat "pesantren" terbaik, dan di sinilah anak-anak dari pesisir utara Jawa melakukan kegiatan pendidikan. Berdasarkan pengamatannya pada beberapa karya sastra lama, Martin tidak menemukan istilah pesantren. Dalam Serat Centhini dijelaskan bahwa salah seorang tokoh pemeran dalam karya ini, seorang pertapa bernama Danadarma, mengaku telah belajar tiga tahun di Karang, Banten, di bawah bimbingan "Syekh Kadir Jalena". Tokoh utama lainnya, Jayengresmi alias Among Raga, juga diceritakan ia belajar di paguron Karang, Banten, di bawah bimbingan seorang guru bangsa Arab bernama Syekh Ibrahim bin Abu Bakar yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Ageng Karang. Dari Karang, Banten, ia pergi ke paguron (perguruan) besar lainnya di desa Wanamarta, Jawa Timur. Makanya dalam Wejangan She Bari (buku panduan *Islam Ortodoks*, menurut GWJ Drewes) tidak ditemukan istilah pesantren, melainkan 'paguron' atau 'padepokan'.

Dari dua teori besar di atas, menurut Hanun Asrarah(2002) hal penting yang bisa dilihat bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan dan sosial keagamaan tidak muncul begitu saja. Pesantren muncul setelah melalui proses interaksi antar Muslim di Jawa dalam

8 Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarikat; Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung:1995), hlm 90

9 Zamakhsyari Dhofier 1994 *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*, (Jakarta, LP3ES)

10 *ibid*, hlm 34

upaya memenuhi kebutuhan pokok terhadap pendidikan Islam. Kontak budaya antara masyarakat Jawa dengan pusat-pusat keislaman dan keilmuan Islam telah memperkenalkan budaya dari luar Jawa, termasuk sistem pendidikan Islam kepada masyarakat. Karena pola perkembangannya berulang-ulang dan menjadi standar, maka proses ini disebut proses pelebagaan atau *institutionalization*.

Mencermati data historis seperti di atas agaknya memang tidak mudah untuk menemukan satu kesimpulan yang pasti tentang asal usul pesantren. Tetapi beberapa pandangan di atas juga memberikan gambaran kepada kita bahwa percampuran tradisi dalam pelebagaan pesantren di awal kemunculannya. Pertimbangan yang dilakukan para penyebar Islam di Jawa untuk membangun sebuah sistem pesantren adalah karena Indonesia saat penyebaran Islam berlangsung masih didominasi ajaran Hindu-Budha. Karena itu pilihan pesantren sebagai model lembaga dakwah adalah sebagai bentuk akulturasi (*acculturation*) dan kontak budaya (*cultural contact*) dengan budaya setempat yang masih hidup dan berkembang. Tetapi, seperti di kemukakan Abdurrahman Wahid¹¹, model akulturasi yang dilakukan para wali ini bukan dalam kapasitas untuk saling mengalahkan antar satu budaya dengan budaya yang lain, tetapi lebih pada pengembangan pola nalar keagamaan serta usaha mepertemukan jembatan yang memisahkan antara agama dan budaya. Dalam bahasa yang sederhana, pengembangan nilai-nilai toleransi menjadi prinsip utama di masa-masa awal berdirinya pesantren saat bersanding dengan budaya lain.

Dengan menilik data sejarah sebagaimana di atas, setidaknya bisa dimpulkan bahwa sejarah panjang kelahiran serta keberadaan pesantren yang mampu bertahan hingga saat ini salah satunya karena pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman sebagaimana dibawa para wali, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*)¹². Sebagai lembaga *indigenous*, pesantren muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya. Dalam pandangan Azyumardi Azra¹³ ketahanan pesantren yang mampu bertahan hingga saat ini disebabkan karena kultur Jawa yang ketika itu masih identik dengan pesantren mampu menyerap kebudayaan luar melalui suatu proses *interiosasi* tanpa kehilangan identitasnya.

Selain itu, sejarah kelahiran serta perjalanan pesantren di Nusantara yang memang banyak bersinggungan dengan kebudayaan pribumi tampaknya juga merupakan pertemuan antara tradisi *zawiyah*

11 Abdurrahman Wahid, op.cit, hlm 21

12 Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, (Jakarta, Paramadina:1997), hlm 75

13 *Ibid*, hlm 89

(lingkaran pengajian Islam) yang berkembang di Tanah Suci dan tradisi padepokan (perguruan Hindu-Budha) yang berkembang di Nusantara selama berabad-abad. Pertemuan tersebut tidak hanya mempertemukan format dengan isi yang berlangsung searah tetapi keduanya saling mengisi. Karakteristik itulah yang juga menyebabkan tradisi pesantren selalu terbuka dan selektif terhadap kebudayaan lain. Itu pulalah yang menjadi sebab mengapa pesantren hingga saat ini tetap eksis dengan karakteristik yang dimilikinya.

Demikianlah, konjungtur serta sejarah panjang kehidupan pesantren mulai masa penyebaran Islam, masa kolonial Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan hingga saat ini telah melewati pengalaman yang berliku. Pesantren pun akhirnya saat ini diakui sebagai aset sekaligus potensi pembangunan. Abdurrahman Wahid¹⁴ menyebut ketahanan pesantren disebabkan pola kehidupan yang unik, yang disebut sebagai subkultur. Pesantren dengan segala keunikan dan karakteristiknya itulah (bukan dalam artian romantisme belaka), dan dengan dikombinasikan dengan nilai-nilai baru yang relevan, akhirnya mampu menjadikannya sebagai potret Islam Indonesia.

Pesantren dan Upaya Meneguhkan Islam Indonesia; Sebuah Rintisan Dialog Keterbukaan

Sejak awal perkembangannya, pesantren telah menjadi pusat dialogis antara tradisi lokal dan ajaran Islam. Akulturasi, asimilasi dan adaptasi tradisi lokal yang animis dan nilai-nilai Arab menghasilkan tradisi baru bernama "Islam Indonesia" yang selalu membawa sikap harmonis dalam strategi pengembangannya, baik di bidang dakwah, sosial maupun pendidikan. Pada titik itulah sesungguhnya pesantren dapat dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dalam proses pembentukan identitas budaya bangsa Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa cikal bakal pesantren di Jawa telah dimulai oleh *Walisanga* yang memiliki keragaman metode dalam melakukan dakwah. Metode tersebut kemudian dikembangkan oleh beberapa generasi sesudahnya dengan cara melembagakan pendidikan dalam institusi pendidikan Islam tradisional. Karena itu tampaknya tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa pesantren telah menjadi semacam *local genius* dalam model pendidikan di Indonesia. Di kalangan umat Islam sendiri, pesantren telah dianggap sebagai model institusi pendidikan yang mempunyai keunggulan baik pada sisi tradisi keilmuan-yang oleh

14 *Ibid*, hlm 90

Martin van Bruinessen¹⁵ dinilai sebagai salah satu tradisi agung (*great tradition*), maupun pada sisi transmisi dan internalisasi moralitas.

Kemampuan pesantren yang selalu mampu berdialog dengan kebudayaan lain sesungguhnya dapat dilihat dan ditarik kebelakang dengan melihat imam-imam mazhab yang selama ini menjadi panutan dalam tradisi ahlussunah wal jamaah. Imam Maliki, misalnya, sangat menjunjung tinggi dan mengutamakan adat istiadat setempat dalam ijihad hukumnya. Sementara Imam Hanafi dikenal sangat rasional karena mengembangkan Islam menurut tradisi Persia yang memang kosmopolit. Sedangkan Imam Syafii menekankan pentingnya pertimbangan geografis dalam perumusan ajaran Islam. Kelaziman untuk selalu terbuka atas berbagai pandangan dan perspektif semacam itulah yang berkembang di pesantren di Nusantara, yang berusaha terus menerus mempertemukan doktrin Islam dengan budaya setempat. Tradisi itu pula yang kemudian menjadi corak Islam Nusantara yang digrekkkan oleh para sufi yang berbasis di pesantren. Pada masa awal perkembangannya, para sufi pada umumnya berprofesi sebagai pedagang.

Kalau kita lihat, dalam tradisi Sunni Asy'ariyah, mazhab teologi yang merupakan mazhab yang dominan di Nusantara dan digerakkan dari pesantren tradisional dikenal sebagai teologi dealiktis, yang tidak hanya memadukan antara doktrin (wahyu) dan rasio (akal), tetapi juga selalu berupaya memadukan antara doktrin dan tradisi¹⁶. Prinsip teologi inilah yang dikembangkan pesantren dalam mengembangkan ajaran Islam, sehingga apresiasi dunia pesantren terhadap nilai adat dan tradisi setempat memiliki landasan teologis yang kuat. Dengan landasan teologi semacam itu, Islam yang dikembangkan di kalangan pesantren tidak diadopsi begitu saja dari tradisi Arab, tetapi diasimilasikan dengan nilai-nilai setempat dalam sebuah upaya adaptasi agar Islam memperoleh penerimaan yang tinggi. Bagi sebagian kelompok, cara ini memang tampak menyimpang dari garis ortodoksi. Tetapi bagi kalangan Sunni ahlussunah wal jamaah hal ini tidak dianggap sebagai bid'ah apagi musyrik. Kalangan pesantren menilai bahwa "penyimpangan" tersebut (jika dikatakan penyimpangan) lebih menyangkut kemasan dan sama sekali bukan substansi.

Konsekuensi dari pergumulan Islam dengan kebudayaan setempat sebagaimana dilakukan oleh kalangan Islam pesantren akhirnya mengakibatkan amaliah Islam Nusantra menjadi berbeda ketika dibandingkan dengan Islam yang berkembang di Timur Tengah atau dunia Islam lain. Perbedaan tidak hanya terkait bahasa semata,

¹⁵ *Ibid*, hlm 95

¹⁶ *Ibid*, hlm 54

tetapi juga sarana kultural dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi penunjang serta rangkaian prosesi yang dilaksanakan. Hal-hal itulah yang sesungguhnya menjadi salah satu ciri utama Islam Indonesia. Contoh sederhannya adalah gelar keagamaan dan juga tokoh agama. Jika di Timur Tengah dikenal dengan sebutan *mursyid, syaikh, sayyidina*, maka tokoh agama di Nusantara akan diberi gelar dengan tradisi setempat, misalnya *susuhunan, kiai, ajengan, tuan guru, panembahan* dan sebagainya. Beberapa hal tersebut tampaknya merupakan "kreatifitas budaya" dalam bernegosiasi dengan kebudayaan setempat. Dan itu jelas akan semakin memperkaya khazanah budaya tanpa menghilangkan substansi dari keberagaman. Pada taraf tertentu, model-model kreatifitas budaya semacam itulah yang sesungguhnya mampu melahirkan sebuah rintisan dialog keterbukaan ketika berhadapan dengan budaya-budaya lain di masa yang akan datang. Rintisan dialog itulah yang kemudian akan mampu merajut kebersamaan untuk membangun sebuah peradaban.

Ketika kita menyimak sejarah, proses pergumulan Islam dengan kebudayaan setempat yang paling intensif terlihat pada zaman Walisanga. Masa ini merupakan masa peralihan besar dari Hindu-Jawa yang mulai pudar menuju fajar zaman Islam. Mereka meneruskan penulisan tradisi sastra zaman klasik Majapahit yang sangat kaya dengan menuliskan *babad, piwulang, serat, primbon* dan sebagainya dengan orientasi Islam. Hasil pergumulan para wali yang dikembangkan di beberapa pesantren besar di Jawa seperti Ampel, Giri dan Bonag, kemudian disebarluaskan ke seluruh Nusantara, termasuk Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku¹⁷. Bukti sosiologis secara jelas menunjukkan bahwa pesantren dan tradisi keagamaan yang berkembang di daerah-daerah tersebut memiliki apresiasi yang sangat tinggi terhadap kebudayaan baik yang bercorak Hindu, Budha, maupun kepercayaan tradisi lainnya.

Keramahan serta keterbukaan terhadap tradisi dan budaya setempat itu kemudian diramu menjadi watak dasar Islam pesantren. Karena wajah seperti itulah yang akhirnya menjadikan Islam begitu mudah diterima oleh berbagai etnis di Nusantara. Hal ini terjadi karena terdapat kesesuaian antara Islam dan kepercayaan lama, tetapi pada saat bersamaan kepercayaan tersebut diapresiasi dan kemudian diintegrasikan ke dalam doktrin dan budaya Islam. Karena kemampuan berdialog dan melakukan tawar-menawar dengan kebudayaan setempat itulah yang menyebabkan pesantren dan Islam

17 Graaf, de dan Pegeaud, 1987 *Kerajaan Islam di Jawa, Peralihan dari Majapahit ke Mataram* (Jakarta, Grafiti.)

secara umumbisa berkembang tanpa menemukan benturan yang berarti dengan tradisi atau kebudayaan yang ditemui.

Merefleksi dari hal di atas, apa makna yang bisa diambil? Pesantren ternyata punya modal besar untuk melakukan perubahan di masa mendatang. Keterbukaan dialog yang dibangun, penghargaan terhadap budaya lain yang berkembang, kreativitas-kerativitas yang diciptakan dalam menghadapi persoalan, kemampuan menuangkan ide dalam sebuah tulisan, serta kemampuan negosiasi dengan kebudayaan baru yang datang adalah modal tak terhingga yang dimiliki pesantren sebagai cikal bakal wajah Islam Indonesia. Dalam bahasa Putnam¹⁸ modal sosial berupa *trust* (kepercayaan) yang selama ini diberikan masyarakat kepada pesantren harus mampu diolah dan dikembangkan kearah yang lebih baik guna menampilkan wajah Islam Indoensia yang humanis dan toleran. Semua itu, ketika mampu dikembangkan dengan pemakanaan yang baru serta kreativitas yang baru sesuai dengan tantangan yang saat ini dihadapi tentu tidak mustahil pesantren benar-benar mampu merajut keberagaman yang berkembang dan menjadi pusat peradaban Islam Indonesia. Tentu pesantren juga harus menerima kritik atas hal-hal yang dinilai akan meghambat kemajuan pesantren itu sendiri seperti kan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Keterbukaan dan Survivelitas di Tengah Perubahan; Menuju Peran Pesantren Ideal

Sebagai lembaga yang merupakan potret Islam Indonesia, kontinuitas keberadaan pesantren yang bisa eksis hingga saat ini tentu bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Tetapi ada semacam nilai yang terkandung di dalamnya sehingga pesantren memiliki daya tahan yang kuat dalam sejarah keberlangsungannya. Dunia pesantren, meminjam kerangka Hossein Nasr, adalah dunia tradisional Islam, yakni dunia yang mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan ulama dari masa ke masa, tidak terbatas pada periode tertentu dalam sejarah Islam, seperti periode kaum salaf, yakni periode para sahabat Nabi dan tabi'in. Istilah salaf bagi kalangan pesantren mengacu pada pengertian "pesantren tradisional" yang justru sarat dengan pandangan dunia dan praktik Islam sebagai warisan sejarah, khususnya bidang syariah dan tasawuf.

Karena itu, tetap bertahannya pesantren agaknya implisit mengisyaratkan bahwa tradisi dunia Islam dalam segi-segi tertentu

¹⁸ *Ibid*, hlm 6

masih tetap relevan di tengah arus perubahan global, meski bukan berarti tanpa kompromi sama sekali. Karena sifat kompromistis dan kelenturan pesantren dengan ajaran aswaja-nya itulah yang juga menjadi sebab mengapa pesantren mampu bertahan sepanjang sejarah. Memang, pada awalnya pesantren tampak “enggan” menerima perubahan, tapi secara gradual pesantren kemudian melakukan akomodasi dan konsesi tertentu untuk kemudian menemukan pola yang dipandang cukup tepat guna menghadapi perubahan yang kian cepat. Tapi satu hal yang pasti, semua akomodasi dan penyesuaian itu dilakukan pesantren tanpa mengorbankan esensi dan hal-hal dasar lainnya dalam eksistensi pesantren.

Pada titik inilah sesungguhnya pesantren mampu bertahan bukan hanya karena kemampuannya untuk melakukan *adjustment* dan *readjustment* seperti di atas. Tapi lebih dari itu, karena karakter eksistensial pesantren sebagai lembaga yang tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga keindonesiaan. Dengan lain kata, pesantren berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya. Pesantren juga mempunyai keterkaitan yang erat yang tak terpisahkan dengan komunitas lingkungannya. Kenyataan ini bisa dilihat tidak hanya dari latar belakang pendirian pesantren pada satu lingkungan tertentu, tetapi juga dalam pemeliharaan eksistensi pesantren itu sendiri melalui pemberian wakaf, sadaqah, hibah dan sebagainya. Sebaliknya pun pesantren juga punya sumbangsih terhadap lingkungannya dengan berbagai bentuk. Dari mulai pelayanan pendidikan dan keagamaan hingga sampai bimbingan sosial, kultural, serta ekonomi bagi masyarakat lingkungannya.

Beberapa uraian di atas memang menggambarkan tentang kekuatan pesantren sebagai wajah asli Islam Indonesia dalam mempertahankan eksistensinya. Pertanyaan besar yang layak dijawab selanjutnya adalah: bagaimana pesantren menghadapi gelombang perubahan yang begitu besar diberbagai bidang? Apa kira-kira yang kemudian bisa dilakukan pesantren agar bisa mengimbangi perubahan tersebut? Jawaban atas pertanyaan mendasar tersebut akan mampu menggambarkan bagaimana pesantren merespon perubahan yang terjadi. Kita sepenuhnya sepakat bahwa pesantren sesungguhnya punya modal besar sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*) dalam masyarakat. Pesantren juga punya kekuatan untuk merajut keragaman serta membangun nilai-nilai toleransi sebagai modal membangun peradaban di masa depan. Bahkan, ketika dilihat

dari perspektif *people centered development*-sebuah model pembangunan alternatif yang pernah diintrodusir oleh David C, Korten ¹⁹pesantren tampaknya juga lebih dekat dan mengetahui seluk beluk masyarakat yang berada di lapisan bawah. Pesantren dalam konteks ini telah mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*). Tapi, guna menjawab perubahan dunia dan lingkungan yang begitu cepat-yang oleh Giddens digambarkan seperti kereta besar yang melaju kencang-ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh dunia pesantren. Langkah-langkah ini penting ketika hendak menjadikan pesantren sebagai pusat peradaban muslim di Indonesia, sehingga pesantren tidak terjebak pada romantisme yang sangat artifisial dan dalam dalam beberapa justru aka merugikan pesantren sendiri. Tentu, semua itu dilakukan tanpa harus mengorbankan watak asli pesantren dengan segala keunika dan tradisi yang dimiliki.

Beberapa langkah yang mungkin layak dipertimbangkan demi kemajuan pesantren di masa depan antara lain; Pertama, soal kepemimpinan. Kita sepenuhnya tidak akan menggugat kepemimpinan yang sentralistik dalam pesantren, karena memang itulah ciri khas pesantren, terutama pesantren salaf, dan karena pesantren biasanya juga berdiri atas usaha pribadi sang kiai. Yang harus dilakukan adalah mencoba melakukan pembaruan pada lini dibawah kiai. Pembaruan bisa dilakukan misalnya pada penataan manajemen pesantren dan penyiapan yang betul-betul matang generasi-generasi di bawah kiai (bisa ustadz ataupun sang putra kiai). Ini dimaksudkan untuk menjaga kontinuitas keberadaan pesantren jika sewaktu-waktu kiai meninggal dunia. Karena seringkali sebuah pesantren yang awalnya memiliki ribuan santri tiba-tiba lambat laun redup dan mati karena ditinggal wafat sang kiai. Karena itu ke depan hal ini harus diantisipasi dengan langkah yang terprogram dengan baik. Dengan antisipati tersebut keberlangsungan pesantren dengan seluruh modal besar yang dimiliki bisa dijaga.

Kedua, pembenahan di bidang metodologi. Telah umum diketahui bahwa pesantren mempunyai tradisi yang sangat kuat dibidang transmisi keilmuan klasik. Namun, karena kurang adanya improvisasi metodolgi, proses transmisi akhirnya kerap kali melahirkan penumpukan keilmuan. Pada ranah inilah menurut Martin van Bruinessen ²⁰ yang sering terjadi di pesantren selama ini adalah sebuah ilmu dianggap sesuatu yang bulat dan tidak dapat ditambah. Paradigma inilah yang sesungguhnya penting untuk dikaji ulang. Sesungguhnya proses transmisi keilmuan

¹⁹ David C, Korten, *Getting to Twenty First Century, Voluntary Action and Global Agenda*(USA, Kumarian Press: 1990), hlm 34

²⁰ *Ibid*, hlm 10

masih bisa dipertahankan, karena ia akan menyambungkan mata rantai keilmuan sebagai salah satu tradisi dalam ahlusunah wal jamaah. Hanya yang diperlukan adalah proses kreatif yang juga harus ditumbuhkan di pesantren, sehingga betul-betul terjadi pengkayaan pengetahuan dan juga ijtihad ilmu pengetahuan. Seperti di sebut dalam hadist, bahwa orang yang berijtihad dalam soal kebaiakan maka ketika ijtihadnya itu salah ia akan tetap mendapatkan satu pahala. Apalagi jika ijtihad dibidang ilmu itu benar dan punya manfaat dalam jangka panjang. Dengan demikian proses transmisi yang berlangsung di pesantren tidak hanya sekedar *taken for granted*. Karena ketika yang terjadi adalah proses transmisi yang *taken for granted* maka pengajaran yang berlangsung akan berdampak pada lemahnya kreativitas. Dan ketika yang dipahami adalah persoalan fikih, yang selama ini memang menjadi penekanan utama dalam ajaran pesantren dan kalangan ahlusunah wal jamaah-maka dampaknya penerapan fikih dalam masyarakat akan menjadi teralienasi dengan realitas sosial. Selain itu juga akan terjadi jurang yang lebar dengan keilmuan yang saat ini berkembang pesat dan teknologi kontemporer yang saat ini menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari.

Ketiga, dan ini yang sering dialami adalah soal disorientasi. Seringkali pesantren kehilangan kemampuan mendefinisikan dan memposisikan dirinya di tengah realitas sosial yang terjadi. Di era yang terus berubah dengan cepat ini, pesantren sering mengalami dilema antar keharusan mempertahankan jati dirinya dengan kebutuhan menyerap budaya baru yang datang dari luar. Karena itu, pesantren dalam hal ini dituntut untuk melakukan reorientasi terhadap peran-peran pendidikan, keagamaan dan peran sosial yang pernah diembannya. Maka hubungan interaktif antara pesantren dengan masyarakat tetap harus dipertahankan.

Keempat, jaringan antar pesantren. Kita tahu jumlah pesantren yang ada di Indonesia jumlahnya ribuan. Tak jarang, dalam sebuah desa jumlah pesantren bisa lebih dari satu. Kasus yang seringkali terjadi adalah terdapat sebuah pesantren yang begitu pesat perkembangannya-baik sistem pendidikannya, bangunan fisiknya, jumlah santrinya- tetapi pada saat bersamaan terdapat pesantren yang hampir mati suri. Dari pengamatan penulis yang kebetulan pernah mengenyam pendidikan pesantren, seringkali memang tidak terbangun dialog yang baik antar pesantren. Dialog yang baik jelas akan melahirkan kekuatan yang luar biasa bagi pesantren-pesantren. Kita tahu, pesantren saat ini banyak yang telah memiliki sumber daya yang sangat kaya. Kita bisa mengambil contoh pesantren

Sidogiri dengan koperasinya yang beraset miliaran rupiah, pesantren Annuqoyah dengan kekuatan di bidang jurnalistiknya, serta beberapa pesantren yang memiliki program simpan pinjam dan sebagainya. Ketika seluruh sumberdaya dan keunggulan masing-masing tersebut mampu ditransfer kepada pesantren-pesantren lain yang kebetula kurang berpengalaman niscaya pesantren akan menjadi kekuatan luar biasa yang mampu menggerakkan perubahan sosial dari lingkungan dimana ia berada. Jaringan antar pesantren ketika mampu dibangun dengan baik maka keberadaan pesantren benar-benar akan mampu menjadi pusat peradaban. Ini tentu buka impian belaka. Karena kalau kita menghitung jumlah sumberdaya yang dimiliki pesantren di seluruh Indonesia, tentu hal ini adalah sesuatu yang tidak mustahil.

Keempat hal di atas tampaknya harus benar-benar dipikirkan oleh lembaga pesantren sehingga keberadaannya bukan hanya sekedar mempertahankan eksistensinya, tetapi lebih dari itu, dengan penyesuaian, akomodasi dan konsesi yang diberikan pesantren pada gilirannya mampu mengembangkan diri, dan bahkan mampu menempatkan diri pada posisi penting sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia. Tentu, keempat hal di atas bukan variabel utama untuk menuju sebuah cita-cita besar pesantren sebagai pusat peradaban kaum muslimin. Ada beberapa hal yang juga cukup substansial yang bisa menjadi modal besar bagi pesantren untuk berkiprah di tengah era global saat ini.

Peran Sosial Pesantren dan Upaya Membaca Kembali Nilai dan Tradisi

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Indonesia, kehadiran pesantren tampaknya menjadi suatu keniscayaan untuk dilibatkan. Sebab, pesantren, sejak kemunculannya memang tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat. Lembaga keagamaan ini tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Tujuan utama didirikannya pesantren adalah sebagai upaya melakukan transformasi sosial bagi masyarakat²¹. Pesantren hadir mengabdikan dirinya mengembangkan dakwah Islam dalam pengertian luas, mengembangkan masyarakat sesuai nilai-nilai keagamaan, dan pada gilirannya semua itu didukung penuh oleh masyarakat.

Argumentasi paling kokoh mengapa pelibatan pesantren menjadi penting dalam ranah pemberdayaan masyarakat karena

²¹ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta, LP3ES: 1987), hlm 64

masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim pada umumnya menetap di daerah pedesaan²². Pada titik itulah, pesantren yang memang berkembang dan tersebar di daerah-daerah pedesaan, sampai derajat tertentu, merupakan representasi masyarakat muslim di pedesaan-pedesaan. Kenyataan itu membuat pesantren hingga saat ini masih berpengaruh kuat pada hampir seluruh aspek kehidupan di kalangan masyarakat muslim pedesaan yang taat. Oleh karena itu, sejalan yang dikatakan Wirosardjono²³ bahwa setiap pengembangan pemikiran dan interpretasi keagamaan yang berasal dari elite pesantren sebagai pusat pendidikan Islam dan instruksi keagamaan tidak akan memiliki dampak signifikan terhadap way of life dan sikap masyarakat Islam di pedesaan. Meskipun memang, akhir-akhir sebuah riset yang dilakukan Sunyoto Usman²⁴ di Kab. Jombang menunjukkan telah terjadi pergeseran peran ulama pesantren di masyarakat. Tetapi riset yang dilakukan Usman tersebut hanya membidik soal pengaruh kiai terhadap persoalan-persoalan kehidupan diluar wilayah keagamaan. Namun, secara umum, penelitian tersebut tetap mengakui peran penting kiai dalam masyarakat desa, terutama di kalangan muslim yang taat, dan dalam persoalan keagamaan. Semua itu menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bentuk pengembangan masyarakat sipil (*civil society*) multak harus melibatkan pesantren. Karena itulah, pesantren harus kembali mereposisi peran-peran sosialnya dengan memaknai pembacaan atas nilai-nilai tradisi yang diyakini dengan lebih kreatif, kontekstual, transformatif dan sesuai tuntutan zaman.

Peran-peran sosial dan pemberdayaan dapat dilakukan pesantren karena secara embrional, pesantren sesungguhnya telah mengembangkan aspek-aspek tertentu dari nilai-nilai yang ada pada civil society. Tentu hal ini bukan sekedar romantisasi sejarah atau upaya mencari justifikasi. Sejak awal berdirinya, lembaga sosial dan keagamaan ini sangat menekankan kepada morealitas yang mejunjung tinggi nilai-nilai kemandirian, kesederhanaan, kerja keras dan sejenisnya. Kemandirian dan moderasi yang dianut pesantren dan ditekankan kepada para santri itu merupakan modal utama dalam mengantarkan para santri dan masyarakat sekitar menuju pembnetukan masyarakat yang diinginkan.

Karakteristik semacam itulah yang menurut Abdurrahman

²² *Ibid*, hlm 78

²³ S Wirosardjono, *The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia* (Jakarta, P3M:1988), hlm 32

²⁴ Endang Turmuzdi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta, Lkis:2002), hlm 65

Wahid²⁵ telah mengantarkan pesantren kepada eksistensinya yang unik sebagai subkultur dengan *alternated way of life*. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi posisi pesantren. Pesantren dengan kemandiriannya, misalnya, memeprihatikan bahwa poila dan cara hidupnya yang berbeda dan berada di luar hirarki negara sehingga secara potensia; memiliki posisi daya tawar cukup tinggi *vis a vis* negara. Pada posisis seperti itulah, pesantren secara subtansial merupakan agen *civil society* yang sejati.

Sayangnya memang, pesantren belum sepenuhnya mampu menerjemahkan secara kreatif nilai-nilai tersebut dalam konteks kekinian. Kenyataan menunjukkan, masyarakat islam, termasuk di dalamnya komunitas pesantren, masih tertinggal dalam mentransformasikan dirinya sebagai agen pemberdayaan masyarakat²⁶. Misalnya, nilai-nilai kemandirian yang dianut pesantren masih lebih menampakkan aspeknya yang bersifat individual, atau sangat lokal, dan belum mampu menjadi sikap sosial kemasyarakatan yang transformatif. Inilah sesungguhnya menjadi agenda pesantren di masa mendatang ketika ia hendak menjadikan dirinya sebagai pusat peradaban umat Islam Indonesia. Rintisan-rintisan peran sosial pesantren harus benar-benar punya manfaat secara sosial dalam skala yang lebih luas dan harus melampaui sekat-sekat priomdialisme yang sempit. Keberadaan pesantren harus mampu menjadi bagian dari solusi masyarakat sekitarnya, dan dalam skala yang lebih luas menjadi “rahmat” bagi masyarakat secara luas.

Komitmen ini menjadi penting karena pemaknaan sebagian pesantren terhadap arti pengabdian dan pengembangan masyarakat seringkali masih bersifat parsial dan melulu ditekankan pada aspek-aspek pengembangan kelmuan keagamaan murni. Aspek tertsebut tentu saja penting dan harus tetap dikembangkan. Hanya saja, pesantren yang sejak berdirinya memiliki watak pelayanan dan pengabdian masyarakat, dalam realitasnya ternyata seringkali tidak mampu menerjemahkan kosep tersebut ke dalam pengertian holistik yang berdimensi ilmu dan amal. Sebagai konsekuensinya, pemberdayaan masyarakat di kalangan pesantren belum disentuh secara kreatif dan serius dalam bentuk penyatuan integral dan eksplisit dalam kurikulum yang dikembangkan pesantren. Tradisi yang dimiliki pesantren tersebut tidak cukup hanya berkembang dalam dirinya sendiri ketika

²⁵ *Ibid*, hlm.66

²⁶ Muhamad AS Hikam, “Wacana Intelektual tentang *Civil Sociaty* di Indonesia, dalam Jurnal Paramadina Vol 1 nomor 2, 1999

ia hendak dimetamorfosiskan sebagai nilai-nilai *civil society* yang berkeadaban, universal, dan berorientasi jauh ke depan. Pesantren harus mulai melakukan langkah-langkah strategis untuk menjadikan dirinya benar-benar sebagai agen perubahan sosial.

Sebagai salah satu upaya merevitalisasi peran sosialnya di tengah perubahan yang begitu cepat, maka pesantren harus membaca kembali nilai dan tradisi yang dimilikinya dalam pemaknaan yang lebih kreatif dan transformatif. Misalnya soal kemandirian, keihlasan dan kesederhanaan. Ketiga hal tersebut merupakan nilai-nilai yang dapat melepaskan masyarakat dari dampak negatif globalisasi dalam membentuk ketergantungan dan pola hidup konsumerisme yang lambat laun pasti akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial. Persoalannya kemudian adalah bagaimana mengembangkan dan melabuhkan nilai-nilai tersebut dalam hidup keseharian masyarakat, serta merumus ulang nilai-nilai tersebut dalam konteks kekinian. Sebab tanpa adanya upaya revitalisasi, nilai-nilai tersebut akan menjadi simbol-simbol formalistik yang tidak menjadi sumber rujukan dalam sikap hidup.

Beranjak dari situ, maka salah satu strategi dasar yang perlu dilakukan untuk mencapai ke arah itu adalah lewat pengembalian pendidikan pada makna hakiki. Persoalan ini penting karena dewasa ini pendidikan telah mengalami pembiasan arti dengan melihatnya hanya sekadar sebagai wacana pengajaran yang lebih menitik beratkan pada transfer pengetahuan semata. Bahkan dalam kasus tertentu, pendidikan hanya diidentikan dengan perolehan ijazah semata, atau atribut-atribut formal lainnya yang bersifat artifisial semata. Pesantren dalam hal ini harus mampu mendekonstruksi cara pandang semacam ini dengan cara-meninkjam istilah Fuad Hasan (1986) meletakkan dan memformulasikan pendidikan sebagai proses manusia untuk *having* dan memantapkannya sebagai *being*. Dalam pengertian ini pendidikan diarahkan sebagai proses penanaman nilai-nilai dan perluasan wawasan sehingga manusia benar-benar tercerahkan.

Pesantren sebagai lembaga keagamaan Islam saya kira memiliki tugas untuk meletakkan konsep pendidikannya dalam kerangka nilai-nilai di atas. Melalui sistem pendidikan seperti ini, nilai dan tradisi pesantren yang sejatinya merujuk kepada moralitas perlu dikontekstualisasikan dalam persoalan konkrit yang dihadapi masyarakat. Pengembangan masyarakat dengan demikian menjadi tak terelakkan untuk diletakkan secara utuh dalam konsep pendidikan yang dilakukan pesantren. Sebab Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk melakukan pembebasan manusia dari belenggu yang

mereduksi nilai-nilai kemanusiannya. Oleh karena itu, peran ini meniscayakan pesantren sebagai institusi keislaman untuk melibatkan diri ke dalam pengentasan umat manusia dan masyarakat Islam secara khusus dari segala proses yang membuat umat tidak berdaya.

Berbijak pada nilai-nilai monoteisme teologis itulah, nilai-nilai dan tradisi pesantren yang lain perlu dibaca kembali berdasarkan persoalan konkrit yang dihadapi pesantren dan masyarakat. Nilai kemandirian, misalnya, hendaknya tidak dimaknai sebagai ketidaktergantungan dalam diemnsi ekonomi kepada kelompok lain. Akan tetapi hal itu merupakan representasi dari sikap kritis pesantren dalam menyikapi isu-isu dan persoalan yang menghantam mereka. Kemandirian dalam konteks ini juga harus dimaknai sebagai upaya kerja keras dan membangun jaringan sehingga pesantren benar-benar mampu melakukan pemberdayaan masyarakat tanpa selalu tergantung pada sumbangan yang menjadikan pesantren tidak kreatif dan inovatif. Demikian pula soal keihlasan. Nilai ihlas perlu diangkat sebagai nilai yang mengedepankan proses dan prestasi, dan bukan sekedar prestise. Dalam keihlasan juga perlu ditumbuhkan nilai kemanfaatan bagi sesama karena khidupan pada dasarnya adalah sebuah proses yang terus bergerak. Begitupun soal kesederhanaan. Kesederhaan, misalnya, tentu tidak bisa hanya direduksi menjadi "rela dalam hidup kemiskinan". Ia adalah lebih merujuk pada upaya menjalani kehidupan sesuai yang dituhkan, dan jauh dari sikap serakah. Dan, lebih dari semua itu, pemaknaan secara kreatif ini perlu dilakukan terhadap tradisi dan nilai-nilai pesantren lainnya. Beberapa pemaknaan atas nilai-nilai pesantren di atas hanya contoh sederhana saja.

Yang lebih penting dari itu semua, interpretasi kreatif dan *genuine* dari pesantren atas nilai-nilai itu menjadi suatu kemestian. Kemampuan pesantren melakukan hal itu akan mengantarkan pesantren ke dalam peran signifikan dalam menawarkan pendidikan alternatif yang, pada gilirannya, dapat melakukan *community empowerment* sehingga dampak negatif globalisasi, misalnya, dapat diantisipasi. Ketika peran-peran sosial transformatif tersebut dapat diemban dengan baik oleh kalangan pesantren, maka tidak mustahil, ke depan, pesantren benar-benar mampu menjadi pusat peradaban umat Islam di Indonesia.

Pesantren dan Tantangan Masa Depan; Beberapa Persoalan yang Harus Dibenahi

Beberapa uraian di atas sesungguhnya menyembuhkan sebuah kesimpulan bahwa pesantren sejatinya memiliki potensi penting dalam rangka mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui

peran-peran sosial yang dijalankannya. Hanya, sayangnya, lembaga ini masih terbelit beberapa persoalan dasar yang dapat menghambat usaha mengaktualisasikan peran sosial tersebut secara maksimal. Karenanya, pesantren dituntut melakukan suatu strategi yang dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang dimilikinya, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dan sektor pendidikan.

Guna mencapai ke arah itu, maka nilai-nilai dasar yang selama ini menjadi anutan pesantren perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi kekinian. Pada titik ini, dialog antara tradisi dan modernitas perlu dilakukan untuk kompatibilitas *civil society* dalam konteks Indonesia²⁷ Untuk itu, nilai semacam kemandirian dan keterbukaan sebagai nilai dan tradisi pesantren yang menyejarah perlu dijabarkan ke dalam konsep yang lebih universal sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Pararel dengan itu, nilai-nilai moralitas islam universal, seperti keadilan, kesetaraan, dan solidaritas sosial, yang secara implisit terdapat pada visi dan misi semua pesantren perlu digali kembali dan dikembangkan secara kreatif dan otentik dari khazanah keilmuan pesantren yang begitu kaya. Kemampuan melakukan formulasi ini jelas akan dapat mengantarkan pada keniscayaan bagi pesantren untuk melakukan pemberdayaan masyarakat lingkungannya dalam pengertian yang hakiki. Dalam ungkapan lain, *civil society* akan memiliki pijakan teologis yang kuat sehingga pesantren bersama elemen di dalamnya akan terlibat aktif untuk membumikan nilai-nilai tersebut ke dalam masyarakat secara luas, tanpa harus meninggalkan kewajiban utamanya sebagai lembaga pendidikan agama.

Padatahapeselanjutnya, peletakkan sekaligus peran pemberdayaan masyarakat di atas landasan teologis yang kuat akan mengantarkan pesantren untuk merumuskan ulang kurikulum kependidikannya. Tentu kita tidak menganggap kurikulum pesantren kurang memadai. Hanya, sejalan dengan perkembangan zaman yang membutuhkan respon yang cepat, maka revitalisasi dan pembenahan kurikulum tanpa menghilangkan substansi menjadi mendesak dilakukan. Kerja-kerja pengembangan masyarakat praktis dan semacamnya yang selama ini belum terintegrasi secara utuh atau belum diapresiasi ke dalam kurikulum pesantren akan diletakkan secara intrinsik ke dalamnya. Tauhid sosial dengan demikian oleh pesantren akan disikapi sama dengan tauhid *uluhiyah* dan *rububiyah* sehingga kedua unsur tersebut dikembangkan secara integral dan intens dalam dunia pesantren.

²⁷ *Ibid*, hlm 8

Beberapa Persoalan yang Harus Dibenahi; Kritik dan Solusi

Sebagai upaya strategis serta langkah-langkah operasional atas gagasan di atas, maka salah satu hal yang harus dibenahi adalah soal pendidikan di pesantren. Ini penting karena persoalan pendidikan sesungguhnya menjadi ruh dan misi utama kelahiran pesantren selain tentu fungsi dakwah dan sosial. Untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang ideal, tentu pesantren harus menuntaskan persoalan yang dihadapi saat ini. Di sadari atau tidak, gempuran modernisasi dan globalisasi dengan segala dampaknya membuat pesantren sedikit banyak kelimpungan menghadapinya. Respon pesantren selama ini terkesan sangat hati-hati bahkan terkesan bersifat tambal sulam.

Masalah tersebut sangat tampak jelas ketika pesantren mengadopsi sistem “madrasi” yang klasikal. Tampak, pesantren belum mampu sepenuhnya meletakkan sistem itu di bawah nilai-nilai yang selama ini dianutnya. Akibatnya, pada suatu sisi, pesantren tergiring ke dalam dunia yang penuh nilai-nilai pragmatis sehingga tujuan asasi pendidikan menjadi memudar dari waktu ke waktu. Sementara pada sisi lain, pesantren belum mampu melakukan integrasi antardisiplin keilmuan secara utuh dan interdependensi. Mislanya, antara ilmu “agama” dan ilmu “umum” dibiarkan berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak menghasilkan pemahaman yang benar-benar baru, mencerahkan umat, dan sekaligus tetap *genuine*.

Begitu pun dengan manajemen pesantren yang masih menunjukkan wajah serupa. Pesantren, meski tidak semua, selama ini seringkali dikelola seadanya dengan kesan menonjol pada penanganan individual dan bernuansa kharismatik. Sesungguhnya hal tersebut bisa dimaklumi karena, sebagaimana di katakan Manfred Ziemek ²⁸ pesantren diawal kelahirannya memang merupakan usaha pribadi kiai. Tapi ketika zaman telah berubah, harusnya memang dilakukan penataan manajemen pesantren tetapi dengan tetap menempatkan kiai pada posisi yang terhormat dan tanpa menghilangkan otensitas tradisi pesantren. Manajemen kharismatis seorang kiai tidak harus dieliminasi, tetapi disandingkan dengan pola rasional dan dibingkai dengan nilai-nilai moralitas agama. Keterkaitan undur tersebut akan melahirkan suatu manajemen yang modern tanpa kehilangan rohnyanya yang bersifat moral ²⁹. Karena yang sering terjadi orientasi ke depan

²⁸ *Ibid*, hlm 9

²⁹ *Ibid*, hlm 10

pesantren sering tidak dipikirkan dan kurang jelas karena sang kiai terbebani persoalan-persoala praktis keseharian. Visi pesantren yang belum terumuskan secara konkrit menjadi terserap dalam kebijakan-kebijakan pesantren yang sesaat.

Parahnya, kondisi tersebut seringkali diperburuk dengan aspek metodologis yang selama ini belum mengalami perkembangan yang cukup berarti. Pengalaman *penulis* yang sempat nyantri di beberapa pesantren memperlihatkan bahwa pola pendidikan dengan pendekatan yang berjalan searah dan monolog-sampai derajat tertentu-saat ini masih didapati di banyak pesantren. Model semacam itu sesungguhnya sangat memasung kreatifitas dan improvisasi dalam berfikir. Paradoksnya, dalam kitab-kitab yang dipelajari dipesantren tidak pernah mengajarkan semacam itu. Banyak contoh yang memperlihatkan perdebatan antara imam-imam madzab dalam bidang keilmuan. Demikian pula pengkajian keilmuan di pesantren masih diletakkan dalam pola pendekatan yang terpisah. Oleh karena itu, nilai-nilai dan ajaran islam yang universal, holistik, dan saling berkelindan hanya ditangkap secara parsial dan sepotong-sepotong.

Akibatnya, aspek kognitif, afektif dan konatif belum jadi bagian menyatu dalam keseluruhan proses dan hasil pendidikan pesantren³⁰ Implikasi lebih jauh adalah kekurangmampuan pesantren dalam mengapresiasi secara kritis dan kreatif terhadap kekayaan tradisi yang dimilikinya. Melimpahnya khazanah keilmuan Islam klasik yang terdapat dalam pesantren menjadi kurang bermakna sebagai nilai-nilai yang bersifat aplikatif dalam kehidupan konkrit.

Akhirnya pendidikan yang hakiki akan mengalami reduksi dan pembiasan arti. Idealnya, pendidikan meruapakan pengenalan dan pengakuan yang ditanamkan berangsur-angsur ke dalam jiwa manusia sehingga dapat membimbing ke arah pengenalan terhadap Tuhan³¹. Konsep pendidikan semacam itu mulai absen dalam dunia pesantren saat ini sehingga pesantren tidak mampu memberikan nilai-nilai yang benar-benar bersifat transformatif bagi masyarakat.

Persoalan di atas tentu membutuhkan pemecahan solusi terbaiknya yang juga harus berpijak pada dunia pesantren. Yang harus dilakukan saat ini adalah mencoba mencari solusi melalui kekayaan yang dimiliki pesantren, yakni tradisi (*turats*). Warisan tersebut hendaknya dibaca kembali untuk menemukan nilai-nilai substansial yang menjadi inti dari keseluruhan tradisi tersebut, serta direkonstruksi untuk dikembangkan berdasarkan perubahan yang

³⁰ Abd A'la, *Pembaharuan Pesantren* (Yogyakarta, LkiS:2006), hlm .65

³¹ *Ibid*, hlm 89

terjadi. *Al-Turast* sebagai landasan keilmuan [pesantren hendaknya menjadi bingkai dalam merumuskan Islam pesantren dalam konteks kekinian. Dengan kata lain, kontekstualisasi nilai-nilai tradisi menjadi keniscayaan untuk dibumikan dalam realitas pendidikan pesantren. Nilai-nilai kesederhanaan, kemandirian, dan keihlasan perlu dijadikan roh pendidikan dalam suatu rumusan kontekstual yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan kehidupan.

Pembacaan dan pemaknaan kembali terhadap *turast* (tradisi) dalam bentuk *al-qadim al-shalih* tersebut akan berimplikasi langsung terhadap urgensi pengembangan *al-jadid al-aslah*. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi karena rumusan nilai-nilai semacam kemandirian, misalnya, menuntut kearifan pesantren untuk selalu menyikapi perubahan dan meletakkannya sebagai suatu kemistian yang harus dijalani. Melalui itu, pesantren dan masyarakat sekitarnya akan dapat mengetahui kebutuhannya secara riil serta akan selalu mengembangkan dirinya melalui kerja keras.

Dalam konteks di atas itulah maka peran transformatif pesantren benar-benar mampu membawa perubahan terhadap masyarakat. Dan inilah sesungguhnya fungsi ideal yang memang harus dijalankan pesantren. Kemampuan pesantren dalam menjalankan peran sosialnya akan mengantarkan menjadi lembaga yang betul-betul hadir sebagai agen perubahan dalam arti yang sebenarnya, sekaligus penjaga moral yang kukuh di tengah proses dehumanisasi yang berjalan dengan kencang. Artinya keberhasilan dalam tersebut akan membuat pesantren hadir sebagai agen *civil society* yang memiliki daya tawar tinggi terhadap negara. Pada saat yang sama, dengan segudang nilai yang dipegangnya, pesantren akan mampu mengedepankan *civility* yang perlahan tapi pasti akan berkembang di masyarakat. Di sinilah arti pesantren sebagai pendidikan alternatif dan agen pemberdayaan masyarakat menemukan arti yang sesungguhnya.

Penutup

Sebagai catatan penutup, satu hal perlu kita garis bawahi bahwa pesantren sebagai wajah asli Islam Indonesia dalam sejarahnya ternyata mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dialog-dialog dengan adat dan tradisi dimasa-masa awal perkembangannya hingga pesantren mampu bertahan hingga saat ini adalah bukti sejarah tak terbantahkan. Yang perlu dilakukan sekarang adalah merumuskan kembali peran-peran sosial pesantren agar keberadaannya mampu memberikan sumbangan nyata terhadap masyarakat sekitarnya.

Tanpa peran yang nyata, signifikansi pesantren dikhawatirkan akan meredup.

Tantangan pesantren di masa depan jelas semakin besar. Paradigma “mempertahankan yang lama yang masih relevan dan mengambil hal terbaru yang lebih baik” tampaknya harus betul-betul direnungkan ulang dan diberi pemaknaan yang lebih kreatif. Mengapa? Dunia pesantren jelas tidak bisa hanya mempertahankan tradisi lama belaka, karena tak selamanya tradisi relevan dengan kekinian. Karena itu, spirit nilai-nilai itulah yang sesungguhnya penting dipertahankan dengan tetap terbuka dengan perubahan. Masyarakat telah berubah. Mau tidak mau pesantren harus berubah kalau tidak ingin ditinggalkan, tetapi tetap menjaga nilai-nilai luhur yang dimilikinya. Revitalisasi, pembacaan serta pemaknaan atas tradisi pesantren dengan demikian adalah sebuah keniscayaan.

Tak bisa dipungkiri, modernitas telah merubah cara pandang masyarakat. Karena itu, paradigma “mengambil hal terbaru yang lebih baik” yang selama ini dipegang pesantren juga harus dimaknai lebih kreatif untuk mengungkap problem masalah-masalah kontemporer. Dalam konteks ini, pilihan terbaik bagi insan pesantren adalah mendialogkan modernitas dengan paradigma pandangan dunia yang telah diwariskan oleh generasi-generasi pencerahan Islam. Dari dialog yang sehat dan terbuka diharapkan akan muncul sintesis-sintesis baru yang lebih segar dan menggairahkan bagi peradaban manusia. Pada titik inilah fungsi pesantren benar-benar menemukan nilai urgensinya.

Daftar Bacaan

- A'la, Abd, *Pembaharuan Pesantren*, Yogyakarta, LKiS, 2006
- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1987
- Al-Attas, S.M.N, *Preliminary Statement a General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1969.
- Al-Attas, Naguib, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, Bandung, Mizan, 1984
- Bruinessen, Martin van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarikat; Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Bandung, 1995
- Dhofier, Zmakhari, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*, Jakarta, LP3ES, 1994

- Graaf, dee dan Pegeaud, *Kerajaan Islam di Jawa, Peralihan dari Majapahit ke Mataram*, Jakarta, Grafiti, 1987.
- Hikam, Muhamad AS, "Wacana Intelektual tentang Civil Society di Indonesia", dalam *Jurnal Paramadina* Vol 1 nomor 2, 1999.
- Rahardjo, Dawan, *Pesantren dan Pembaruan*, LP3ES, Jakarta, 1995
- Haidar, Ali, *Nahdlatul Ulama da Islam Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1994
- Korten, David, *Getting to Twenty First Century, Voluntary Action and Global Agenda*, USA, Kumarian Press, 1990
- Madjid, Nurcholis, *Bilik-Bilik Pesantren*, Jakarta, Paramadina, 1997
- Qomar, Muzamil, *Pesantren; dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Erlangga, Jakarta, 2008
- Sholeh, Badrus, *Budaya Damai Komunitas Pesantren*, Jakarta, LP3ES, 2007
- Turmudzi, Endang, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta, LKis, 2004
- Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi; Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta, LKiS, 2007
- Wahid, Abdurrahman, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, Jakarta, Desantara, 2001
- Wirosardjono, S, *The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia*, Jakarta, P3M, 1988.
- Ziemek, Manfred, *Pesantren dan Perubahan Sosial*, Jakarta, P3M, 1986